

ISSN : 1693-0053

JURNAL

EKONOMI dan MANAJEMEN

Volume 7, No.2, Juli 2007

Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Departemen Agama
Kabupaten Pulang Pisau
Nafiah Iknor

Pengaruh Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Terhadap
Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)
Ismanto Hadi Santoso
Mohammad Yasid

Hubungan Kemampuan Individu, Karir dan Kondisi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Kantor Administrator Pelabuhan Trisakti Banjarmasin
Budhi Purwandya
Purwanto

Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Motivasi Kerja Guru
UPTD SMAN 1 ARJASA Sumenep
Arasy Alimudin
Moh. Taufik Rahman

Pengaruh Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Haji
pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep
Nurhamin Thaha

Analisis Pertumbuhan Kesejahteraan Buruh di Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2006
Ismanto Hadi Santoso



Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Narotama Surabaya

Jl. A. Rahman Hakim, 51 Surabaya Telp. (031)5910982, Fax (031) 5931213
Email : rektor@narotama.ac.id
arasyali@yahoo.com

ISSN : 1693-0053

JURNAL

EKONOMI dan MANAJEMEN

Volume 7, No.2, Juli 2007

**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Departemen Agama
Kabupaten Pulang Pisau**
Nafiah Ibnor

**Pengaruh Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) Terhadap
Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)**
Ismanto Hadi Santoso
Mohammad Yasid

**Hubungan Kemampuan Individu, Karir dan Kondisi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Kantor Administrator Pelabuhan Trisakti Banjarmasin**
Budhi Purwandya
Purwanto

**Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Motivasi Kerja Guru
UPTD SMAN 1 ARJASA Sumenep**
Arasy Alimudin
Moh. Taufik Rahman

**Pengaruh Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji Terhadap Kepuasan Jamaah Haji
pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep**
Nurhamin Thaha

**Analisis Pertumbuhan Kesejahteraan Buruh di Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2006**
Ismanto Hadi Santoso



**Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Narotama Surabaya**

Jl. A. Rahman Hakim, 51 Surabaya Telp. (031) 5910982, Fax. (031) 5931213
Email : rektor@narotama.ac.id
arasyali@yahoo.com

ISSN : 1693-0053

JURNAL

EKONOMI dan MANAJEMEN

Volume 7, No.1, Januari 2007

Redaksi

Penanggung Jawab

R. Djoko Soemadijo

Pemimpin Redaksi

Budi Purwandaya

Redaksi Pelaksana

Arasy Alimudin

Administrasi & Sirkulasi

Koestiati

Agus Sukoco

Nancy

Penyunting Ahli

Imam Syakir

I.B.M. Santika

Arsona Lakmono

Ismanto Hadi Santoso

Fendy Surhariadi

I Made Suradnya

Soesanto

Penyunting Pelaksana

Ahmad Abidin I

Hermien Tri Dayanti

Slamet Riyanto

Alamat Redaksi

Jl. A. Rahman Hakim, 51 Surabaya

Telp. (031) 5910982, Fax. (031) 5931213

Email : rektor@narotama.ac.id

arasyali@yahoo.com

JURNAL

EKONOMI dan MANAJEMEN

Volume 7, No.2, Juli 2007

DAFTAR ISI

**Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Departemen Agama
Kabupaten Pulang Pisau**

Nafiah Ilnor

**Pengaruh Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya)**

Ismanto Hadi Santoso dan Mohammad Yasid

**Hubungan Kemampuan Individu, Karir dan Kondisi Kerja T
erhadap Kinerja Karyawan Kantor Administrator
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin**

Budhi Purwandya dan Purwanto

**Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Motivasi Kerja Guru
UPTD SMAN 1 ARJASA Sumenep**

Arasy Alimudin dan Moh. Taufik Rahman

**Pengaruh Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji T
erhadap Kepuasan Jamaah Haji pada Kantor Departemen Agama
Kabupaten Sumenep**

Nurhamin Thaha

**Analisis Pertumbuhan Kesejahteraan Buruh di Indonesia
Periode Tahun 2000 - 2006**

Ismanto Hadi Santoso

141-149



**Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Narotama Surabaya**

Jl. A. Rahman Hakim, 51 Surabaya Telp. (031) 5910982, Fax.(031) 5931213

Email : rektor@narotama.ac.id

arasyali@yahoo.com

Analisis Pertumbuhan Kesejahteraan Buruh di Indonesia Periode Tahun 2000 - 2006

Ismanto Hadi Santoso

Abstract

The industries represent the pledge sector in national development economics, development industry's sector give big enough contribution to the national economy which affects to prosperity society. In national development industry problem is labor, especial wages of labor, where it's direct related with prosperity labor.

This Research analysis prosperity increasing of labor which of analysis pursuant to growth labor wages during six year period 2000 to 2006, compared with the fast inflation and consumer's price index, by data sunder which take from some source.

Result of analysis the mean of labor wages per annum go up higher compare the inflation in the same time that happened at the soybean cake. Result of research also to accelerate index of labor wages quicker than the fast of consumer's price index. Labor wages growth higher to compare of accelerate inflation and consumer's price index mean from year to year the level of power labor purchasing increase, so that conclude prosperity labor are growing-up.

Keywords: Wages, Consumer's price, linflation and Prosperity

Sektor industri merupakan sektor yang menjadi tumpuan ekonomi kebanyakan negara maju seperti Amerika, Jerman, Canad, Jepang, dan beberapa Negara maju lainnya. Oleh karena itu Negara-negara berkembang (termasuk Indonesai) juga menepatkan industri sebagai sektor yang menjadi prioritas pembangunan untuk memperkokoh perekonomian nasional. Sektor industri baik untuk memenuhi pasar domestic maupun pasar internasional terus tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan permintaan.

Permasalahan utama dalam perindustrian di Indonesi adalah kurang "harmonis"nya buhungan antara buruh (pekerja) satu sisi dengan pengusaha di sisi lain. Hal ini dapat dilihat oleh maraknya aksi buruh untuk mengajukan berbagai tuntutan terhadap hak-hakny yang merasa "dirampas" oleh pengusaha, sehingga demonstrasi buruh di seluruh pelosok tanah air, khususnya saat menjelang penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam dunia usaha, upah merupakan hal yang sewajarnya sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang diberikan buruh kepada perusahaan. Keberadaan buruh dalam suatu perusahaan harus dimaknai dalam kerangka bisnis kemitraan, bukan kegiatan sosial. Hal tersebut seiring dengan definisi upah pada UU No. 13 Tahun 2003 khususnya pasal 1 ayat 30 tentang ketenaga kerjaan yang berbunyi: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".

Ada dua aliran pemikiran utama dalam aliran ekonomi politik klasik yang sering menjadi rujukan menegani soal upah buruh, yakni "*the distribution of wealth*" dan "*private proverty*" (John S. Mill, 1874: 209-210), upah yang didasarkan pada prinsip "*equality*" (persamaan dan pemerataan), yang mengharuskan setiap individu bekerja untuk "*the production of wealth*" agar mendapatkan imbalan sesuai dengan kebutuhannya, aliran ini kemudian disebut dengan *mazhab sosialis*. Sementara itu "*private proverty*" yang secara umum didefinisikan sebagai "kekayaan" yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil dari usaha penghematan yang dilakukannya. *Private proverty* melihat bahwa *the production of wealth* harus didasarkan pada azas "*diversity*" (perbedaan) dan harus mengakui akan adanya "*In-equality*" (ketidak samaan), tetapi tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, pemikiran ini kemudian disebut dengan *mazhab liberalis*.

Dasar pemikiran *private proverty* kemudian lebih mendominasi pemikiran pasar ekonomi nasional, akan tetapi prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagai prinsip utama yang dikandungnya masih terus menjadi perdebatan. Bahkan tuntutan buruh yang terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini tidak terlepas dari upaya mempertanyakan prinsip keadilan dan hak asasi manusia tersebut. Kebijakan pemerintah daerah (baik Propinsi maupun Kabupaten) tentang upah minimum dinilai terlalu rendah dan tidak rasional. Karena *labor cost* yang tinggi akibat kenaikan BBM yang disertai dengan

kanaikan bahan pokok, belum lagi adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Padahal konsep upah minimum harus mempertimbangkan realitas kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian, pendapatan perkapita, dan upah minimum yang berlaku di daerah dan antar daerah.

Pada dasarnya upaya mensejahterahkan buruh melalui konsep KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dalam UU No 13/2003 Pasal 89 (1) dianggap cukup ideal, namun belum jelas kapan bisa diberlakukan, sampai sekarang ini political will yang masih lemah dari pemerintah. Sehingga penetapan upah buruh sampai sekarang ini tetap didasarkan atas KHM sebagaimana surat edaran Menakertrans ke seluruh gubernur tanggal 16 Juli 2004.

Makna dari upah minimum ini adalah sebagai jaring pengaman terhadap buruh supaya tidak dieksploitasi dan upah yang tidak layak. Karena upah bagi buruh menyangkut nasib dan kehidupannya yang selama ini dibutuhkan untuk kepentingan buruh dan keluarga. Dari penelitian yang dilakukan oleh ASPEK Indonesia (Desember 2005) bahwa upah minimum bagi buruh hanya untuk kepentingan transportasi, konsumsi, dan kontrakan bagi buruh sekeluarga, bahkan sebagian dari mereka upah sekedar untuk bisa bertahan hidup. Padahal, ideal upah secara fundamental memiliki porsi yang strategis dalam konteks hubungan industrial, karena sistem di negeri kita tidak memiliki perlindungan sosial yang progressif. Menghadapi kondisi buruh yang tidak berdaya menghadapi mekanisme tersebut lebih banyak mengambil sikap mengalah, dan sebagian mengambil sikap perlawanan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada aspek inilah, negara idealnya mencari alternatif dan strategi ideal jaminan sosial untuk membantu kaum miskin sebagaimana yang dilakukan di negara-negara maju.

Upah minimum buruh merupakan bentuk perlindungan buruh dalam mekanisme pasar yang terjadi. Apalagi ideology di negeri ini mengharuskan campur tangan negara dalam melakukan perlindungan buruh. Sejalan dengan fungsi negara dalam mewujudkan peran Custodian sebagai peran etsinya, bahwa negara memiliki peran dalam melindungi, mengawasi dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang dapat merugikan buruh (Evans, 2000). Pada aspek lain, hal itu dilakukan untuk membendung mekanisme liberalisasi perdagangan yang sangat cenderung pada sistem fleksibilitas dalam pengupahan (*Wage System Flexibility*). Apalagi Indonesia telah resmi menjadi salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia setelah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU NO. 7/1994, berbagai peluang (*opportunity*) yang dihasilkannya, tapi tidak sedikit

ancaman (*threat*) yang dihidirkannya termasuk hubungannya dengan kondisi buruh.

Ideologi upah minimum yang dianggap jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) tidak terlepas dari skenario penguasa (pemerintah) yang lebih mengakomodir kepentingan pengusaha, di sisi lain Negara terus melakukan kontrol terhadap buruh. Upah buruh yang rendah dan regulasi buruh yang longgar bagi negara dapat menjadi "slogan" untuk terus menarik para investor. Di sisi lain, pengusaha juga dalam posisi dilematis, berhadapan dengan tuntutan kenaikan upah buruh, kebijakan ekonomi pemerintah yang memberatkan dunia usaha dan berbagai aturan yang mengharuskan biaya ekstra mulai dari mengurus izin, pajak sampai pada biaya siluman lainnya. Bagi pengusaha, tentu lebih senang melakukan negosiasi dengan penguasa ketimbang dengan buruh, disamping untuk kelancaran bisnis juga cost yang rendah. Sebaliknya, penguasa membutuhkan dana sebagai support untuk pembangunan dan kepentingan kekuasaan. Belum lagi, penguasa yang juga sebagai pengusaha yang tidak diatur secara jelas regulasinya, akan menambah kuat siklus eksploitasi bagi buruh.

Salah satu analisis ekonomi politik yang sering dipakai dalam memahami dan menjelaskan perilaku birokrat, politisi dan pengusaha adalah *exchange theory* (Grindle, 1977:27-28). Argumen dasar dari exchange theory menyebutkan bahwa *rewards* (ganjaran) merupakan variable penting dalam interaksi antara individu dan kelompok, hadiah bagi yang mendukung dan hukuman bagi yang menghalangi. Bahwa perjuangan untuk pencapaian kepentingan individu sangat berkaitan dengan masalah distribusi sumber daya (*the distribution of resources*). Oleh karena itu, setiap organisasi termasuk partai, birokrasi, perusahaan bisnis bahkan sebagian organisasi buruh yang pragmatis tidak terlepas dari motivasi oleh kepentingan dalam mengakumulasi sumber daya yang tidak dimilikinya guna mencapai tujuan kolektif maupun individu. Di sinilah posisi buruh selalu dalam posisi kalah, bahkan selalu menerima rewards yang berupa hukuman karena selalu dianggap merintang jalan pengusaha dan institusi koleganya. Apalagi kondisi *Supply dan Demand* di pasar tenaga kerja yang tidak berimbang karena tingginya tingkat pencari kerja yang membuat buruh selalu dalam posisi dilematis, melawan atau PHK.

Selain hal tersebut, problem internal buruh dalam soal pengupahan belum tuntas, minimal karena tiga masalah besar: pertama, kelemahan bernegosiasi karena terbatasnya informasi, pengetahuan dan pengalaman yang diperburuk dengan ketidakpercayaan diri wakil serikat buruh yang duduk di Komisi Pengupahan; kedua, persoalan upah masih dijadikan sebagai problem masing-masing organisasi buruh bukan persoalan bagi

buruh, bahkan sebagian organisasi buruh menjadikannya sebagai "isu komersial" sehingga dengan mudah pengusaha dan penguasa untuk menariknya dengan kompensasi yang sedikit pragmatis. Dan ketiga, regulasi yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada buruh, bahkan sangat cenderung terciptanya kondisi kerja yang fleksibel dan liberal, seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No.2 Tahun 2004.

Yang lebih aneh lagi, regulasi yang kurang berpihak pada buruh tersebut sekarang ini terus diintervensi oleh pihak pengusaha agar mengalami perubahan yang lebih berpihak kepadanya. Tidak heran, sejak adanya rencana perubahan regulasi, telah terjadi adanya konflik atau pro-kontra yang sampai sekarang belum menemukan titik temu. Bagi buruh, perubahan yang diinginkan oleh para pengusaha termasuk pengikutnya adalah perubahan ke arah yang lebih buruk, buruk bagi kehidupan buruh masa di depan. Ketika problem pengupahan dalam konteks nasional mengalami status quo karena adanya tarik menarik kepentingan yang cukup seimbang. Pengikut aliran "anti upah buruh tinggi" terus melakukan konsolidasi pada tingkat bawah khususnya di daerah kabupaten dan kota, tidak heran terjadi pengupahan yang "pincang" antara daerah satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut banyak juga dipengaruhi kuat-lemahnya gerakan buruh dalam menuntut kenaikan upah.

Upah Buruh dan Kemiskinan

Upah buruh berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Kenaikkan upah buruh (tani maupun industri) dapat menyebabkan menurunkan tingkat kemiskinan, oleh karena itu kenaikan upah buruh yang terus terjadi beberapa tahun terakhir sejak krisis menurunkan tingkat kemiskinan saat ini, sehingga lebih rendah dibanding sebelum krisis moneter menghantam pada tahun 1997. Tingkat kemiskinan Indonesia, yang pada tahun 1998 mencapai angka tertinggi (24% dari total populasi), telah menurun secara perlahan seiring dengan meningkatnya upah buruh dari berbagai sektor di kota maupun pedesaan. Dampak dari krisis menyebabkan upah buruh di Indonesia dari tahun 1996 hingga 1999 cenderung menurun, yang mengakibatkan kemiskinan meningkat (dari 17 menjadi 24%), namun mulai tahun 2000 terjadi peningkatan upah buruh yang cukup signifikan, sehingga kemiskinan pun berkurang. Perubahan nilai upah buruh tani (UBT) merupakan indikator yang baik untuk melihat perubahan terhadap tingkat kemiskinan. UBT yang digunakan adalah upah riil atau daya beli buruh tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukannya upah nominal yang akan terpengaruh dengan inflasi.

Menurut statistik BPS, pada tahun 1996, kemiskinan nasional mencapai angka 17% dari total populasi yang meningkat hingga 24% pada tahun

Untuk keluar dari krisis dalam pengupahan di negeri, maka wakil buruh dalam komisi pengupahan harus betul-betul memenuhi kriteria yang tepat dan disetujui oleh mayoritas organisasi buruh yang diakui eksistensinya, mendapat pengawasan dan kontrol yang ketat dari organisasi buruh agar tetap bekerja sesuai dengan koridor yang berlaku. Tidak kalah pentingnya, peran publik secara umum untuk terlibat aktif dalam berbagai isu-isu perburuhan agar isu buruh bukan sekedar menjadi isu buruh tapi harus menjadi isu publik yang harus diperjuangkan.

Harus dilakukan penyadaran pada semua komponen bangsa termasuk pemerintah, pengusaha, politisi agar melihat buruh tidak sekedar sebagai buruh yang bekerja sesuai skenario perusahaan bisnis. Tapi buruh juga harus dilihat sebagai rakyat biasa, yang merupakan elemen penting pemegang kedaulatan sah di negeri ini. Mereka seharusnya mendapat pelayanan yang lebih baik. Sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, bahwa Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) bertanggungjawab untuk mengantarkan rakyat menuju tercapainya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera, tentunya lembaga-lembaga lain sangat diharapkan untuk terlibat membantunya termasuk lembaga-lembaga bisnis.

1998. Namun, perekonomian yang fluktuatif menurunkan angka tersebut, sehingga untuk tahun 2004 penduduk miskin di Indonesia tercatat 16%. Kajian BPS yang didukung Asian Development Bank (ADB) itu menggunakan data dari survei nilai tukar petani atau NTP (berdasar upah buruh tani dan harga konsumen pedesaan serta harga produk pertanian), survei harga konsumen untuk menghitung indeks harga konsumen atau IHK (berdasar upah buruh bangunan dan harga konsumen perkotaan) serta survei upah yang dilakukan terhadap buruh industri setiap triwulan.

Kajian itu diadakan untuk membantu Pemerintah RI dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks, karena terkait keterbatasan penyelenggaraan survei dan kajian yang sifatnya tahunan. Dengan adanya kajian dan data-data yang bisa diperoleh secara bulanan, dapat dilihat pola kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah dapat menangani kemiskinan pada daerah yang akan 'jatuh' secara lebih baik. Menunggu satu tahun itu sudah sangat terlambat.

Problem upah yang rendah baik bagi buruh tani maupun buruh industri, menurut dia, dapat ditangani dengan baik bila ada kejelasan apa yang terjadi di tataran makro maupun di lapangan.

Angka kemiskinan tahun ini turun 2,13 juta orang dari tahun lalu. Dengan perubahan garis kemiskinan dari Rp 151.997 per kapita per bulan

menjadi Rp 166.697 per kapita per bulan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia. Bank Dunia menyebutkan, ada tiga ciri menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan yang setara dengan pendapatan perkapita US\$ 1,55 per hari. Sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin, rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tapi dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia (<http://www.berr.gov.uk/employment/pay/national-minimum-wage/index.html>).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap tahun terjadi penurunan nilai rupiah seiring dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan masyarakat, tetapi terjadi kejutan ekonomi berupa anjloknya harga sejumlah barang kebutuhan selama bulan April 2005 lalu. Akibatnya, dalam bulan tersebut indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,16%, suatu hal yang jarang terjadi di negara kita, deflasi yang terjadi hanya sedikit menekan laju inflasi, bulan-bulan berikutnya terjadi lagi inflasi dan pada tahun berikutnya inflasi tetap berada posisi di atas 6%, meski sedikit terkendali. Tapi, kalau Indeks biaya hidup yang dirumuskan beberapa tahun silam itu memang sudah tak sesuai lagi dengan pola konsumsi

METODE PENELITIAN

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data skunder, diambil dari berbagai sumber antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Tenaga Kerja. Variabel yang dianalisis meliputi Indek Harga Konsumen (IHK) yang

Secara garis besar analisis data dilakukan dalam dua tahap,

Pertama dilakukan perhitungan indek dari data UMR, dengan menetapkan tahun 2000 sebagai tahun

sekarang ini. Tapi bagi para buruh, yang setiap tahun berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, turunnya IHK sedikit menghibur. Maklum, harga barang-barang dan jasa sangat memengaruhi daya beli mereka. Bisa saja tahun ini upah nominal buruh mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Tapi, karena harga-harga naik, maka daya beli buruh bisa lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kita ambil contoh tahun 2005, ketika pemerintah menaikkan harga BBM hingga 100% lebih. Pada saat itu, misalkan, upah minimum untuk buruh di Jakarta adalah Rp 771.843 per bulan. Dibandingkan upah minimum 2004, yang hanya sebesar Rp 671.550, jelas ada kenaikan sekitar 15%. Tapi, walaupun upah nominalnya naik, belum tentu kesejahteraan buruh di tahun 2005 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 174 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2006 yang tercatat 106,39 juta. Dari penambahan angkatan kerja itu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari tahun ini mencapai 97,58 juta orang. Dengan begitu, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 10,55 juta orang hingga Februari 2007. Bagaimana pun juga, jika pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor riil, maka pengangguran masih akan membengkak karena angkatan kerja terus bermunculan dan jumlah penduduk yang belum bisa diatasi seperti terlihat pada data periode Maret 2006 populasi penduduk sebesar 221,328 juta orang.

Penelitian ini menganalisis perkembangan upah minimal regional (UMR) yang diterima tuju tahun terakhir (2000 sampai dengan 2006) dari kelompok buruh yang lewelnya di bawah mandor (buruh lewel bawah) yang merupakan kelompok buruh dengan polpulasi terbesar.

mencerminkan perkembangan biaya hidup masyarakat, perkembangan upah minimum regional (UMR) sebagai cermin perkembangan daya beli pekerja (buruh) dan tingkat inlasi sebagai gambaran perkembangan penurunan mata uang.

dasar, dengan pertimbangan tahun tersebut kondisi perekonomian relatip stabil setelah mengalami krisis tahun 1997, dengan rumus sbb. :

$$IUMR_n = \frac{UMR_n}{UMR_0} \times 100$$

Keterangan:

IUMR_n : Indeks Upah Minimum Regional, tahun ke n
UMR_n : Upah Minimum Regional, tahun ke n
UMR₀ : Upah Minimum Regional, tahun dasar

Kedua dilakukan perhitungan trend linier terhadap perkembangan nilai masing-masing variable meliputi : Indek Harga Konsumen (IHK), Upah

Minimum Regional (UMR) dan Inflasi, dengan motode trend linier kuadrat terkecil (*least square*) sbb. :

$$Y_i = a + bX_i$$

dimana :

$$\sum Y_i = na + b \sum X_i$$

$$a \sum X_i + b \sum X_i^2$$

Keterangan:

Y_i : Nilai Trend Variabel, tahun tertentu
X_i : Tahun tertentu
a : Konstanta, dan
b : Koefisien Trend

Hasil Analisis

Besarnya upah buruh mencerminkan kesejahteraan pekerja, oleh karena itu banyak yang berpendapat bahwa tinggi rendahnya upah buruh dapat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin suatu wilayah. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah tiap tahun selalu mengimbau untuk meningkatkan upah buruh melalui upah minim regional (UMR), di sisi lain pengusaha juga mempunyai peranan sangat besar terhadap upaya mengurangi kemiskinan. Kontribusi pengusaha dalam mengurangi kemiskinan masyarakat diwujudkan melalui kenaikan upah buruh untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Untuk kelangsungan usahanya pengusaha membutuhkan pekerja, tanpa pekerja proses produksi akan terganggu meski perusahaan tersebut merupakan *capital intensif*,

terlebih lagi untuk perusahaan yang padat karya, Namun demikian untuk pengembangan usahanya, perusahaan membutuhkan keuntungan (*profit*) tertentu agar bisa melakukan perawatan dan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah mesin-mesin baru atau mengganti sarana produksi lainnya yang sudah using. Oleh karena itu setiap terjadi kenaikan upah buruh selalu terjadi tarik ulur antara serikat pekerja yang mewakili buruh dengan pengusaha untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Untuk mengatasi perbedaan antara buruh dengan pengusaha dalam menetapkan upah miniml yang layak, pemeintah mempunyai peranan penting, oleh karenanya setiap terjadi perselisihan antara buruh dan pekerja pemerintah turut berperan aktif.

Perkembangan Upah Buruh

Tingginya inflasi tiap membuat nilai mata uang turun, membuat daya beli masyarakat menjadi rendah karena barang menjadi mahal seiring dengan naiknya harga barang, terutama kebutuhan pokok.

Kesungguhan pengusaha untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup tiap tahun upah buruh dinaikan. Upah buruh menurut sektor tahun 2000 sampai 2006 ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
Upah Nominal Buruh di Bawah Mandor (Supervisor)
Sektor Pertanian, Industri dan Hotel
Tahun 2000 s/d 2006

Tahun	Upah Nominal Sektor (Rp. 000)			
	Pertanian	Industri	Hotel	Rata-2
2000	394,40	443,65	464,60	434,22
2001	445,30	506,40	522,98	491,56
2002	495,85	588,20	585,70	556,58
2003	563,50	679,00	679,30	640,60
2004	633,85	785,50	781,30	733,55
2005	722,50	890,70	879,20	830,80
2006	807,40	984,10	971,70	921,07

Sumber : BPS, Depnaker

Tabel di atas menunjukkan bahwa upah nominal semua sektor (Pertanian, Industri dan Hotel) tiap tahun naik walau nilai kenaikan nominalnya berbeda. Upah buruh sektor pertanian paling rendah dibanding dengan upah buruh industri atau perhotelan. Pada tahun 2006, rata-rata upah buruh sebesar Rp. 921.070,00 perbulan, dimana upah buruh sektor pertanian, industri dan hotel

masing-masing Rp. 807.400,00; Rp. 984.100,00 dan Rp. 971.700,00. Rendahnya upah buruh sektor pertanian selain sektor ini umumnya tidak membutuhkan ketrampilan khusus, bersifat musiman, hal ini pula sebagai salah satu faktor yang membuat sektor pertanian kurang diminati masyarakat

Kenaikan Upah Buruh VS Inflasi

Mencermati perkembangan upah nominal buruh nampak kenaikan upah buruh tiap tahun cukup tinggi, rata-rata upah buruh naik di atas 10%, lebih tinggi dibanding dengan rata-rata

inflasi sebesar 7,82 dalam kurun waktu yang sama. Besarnya inflasi dan prosentase kenaikan upah buruh pertahun dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Perkembangan Upah Buruh (%) dan Inflasi
Tahun 2001 – 2006

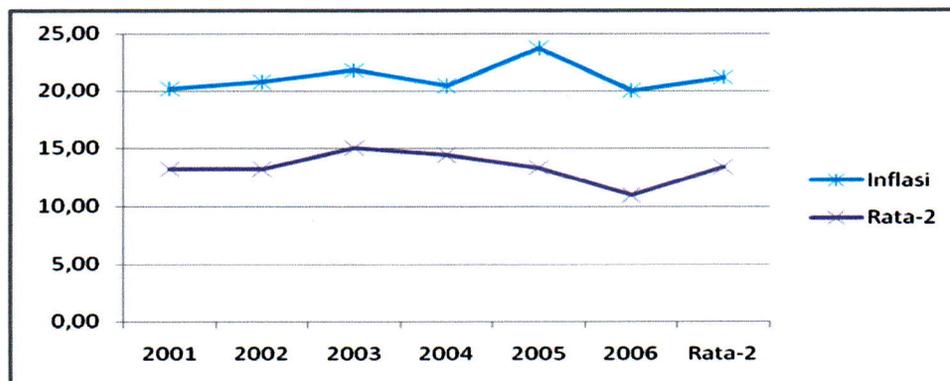
Tahun	Perkembangan Upah (%)			Inflasi (%)
	Sektor			
	Pertanian	Industri	Hotel	
2001	12,91	14,14	12,57	6,96
2002	11,35	16,15	11,99	7,60
2003	13,64	15,44	15,98	6,77
2004	12,48	15,68	15,02	6,06
2005	13,99	13,39	12,53	10,43
2006	11,75	10,49	10,52	9,07
Rata-2	12,69	14,22	13,10	7,82

Sumber: BPS, Depnaker dan BI diolah

Table 2 menunjukkan bahwa selama 6 tahun (2001 s/d 2006) upah buruh sektor industri mengalami kenaikan paling tinggi diantara sektor lain yaitu rata-rata naik besar 14,22% pertahun, perhotelan rata-rata naik sebesar

13,10% pertahun dan terendah sektor pertanian yang naik 12,69% pertahun. Kenaikkan upah tertinggi terjadi pada tahun 2005, tetapi tahun tersebut juga mengalami inflasi tertinggi dibanding tahun-tahun lainnya.

Gabar 1
Perkembangan Kenaikkan Rata-Rata Upah Buruh dan Inflasi
Tahun 2001 s/d 2006



Indeks Upah Buruh VS Indeks Harga Konsumen

Indeks harga konsumen menggambarkan kenaikan biaya hidup masyarakat, dengan membandingkan indeks upah buruh dengan indeks harga konsumen dapat diperoleh perkembangan daya beli buruh dari tahun ketahun terjadi peningkatan atau sebaliknya. Apabila indeks upah buruh lebih tinggi dari indeks harga konsumen berarti daya beli buruh meningkat dan bermakna kesejahteraan buruh lebuah baik.

Hasil analisis indeks dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar menunjukkan secara umum indeks upah buruh dari tahun ketahun lebih tinggi dibanding dengan perkembangan indeks harga konsumen. Upah buruh selama periode tahun 2000 sampai dengan 2006 naik sebesar 111,9 %, sementara harga konsemen hanya naik sebesar 66,86%, seperti ditunjukkan pada table 3.

Tabel 3
Indeks IHK, Upah Riil Buruh di Bawah Mandor (Supervisor),
Sektor Pertanian, Industri dan Hotel, Tahun 2000 s/d 2006

Tahun	INDEK				
	Harga Konsumen	Upah Riil Buruh Sektor			
		Pertanian	Industri	Hotel	Rata-2
2000*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2001	107,92	112,91	114,14	112,57	113,21
2002	122,46	125,72	132,58	126,07	128,12
2003	128,67	142,88	153,05	146,21	147,38
2004	136,93	160,71	177,05	168,17	168,64
2005	160,34	183,19	200,77	189,24	191,07
2006	166,86	204,72	221,82	209,15	211,90

Sumber : Hasil Analisis, * Tahun Dasar

Dibanding sektor industri dan perhotelan indeks upah riil sektor pertanian paling rendah, artinya perkembangan kesejahteraan buruh sekor pertanian

relatip lebih lambat dibanding dengan perkembangan kesejahteraan buruh industri dan perhotelan.

Trend Upah Buruh

Untuk melihat besarnya peningkatan kesejahteraan buruh dari tahun ketahun ditunjukkan oleh besarnya koefisien trend, nilai koefisien trend positif menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh meningkat dari tahun ke tahun, sebaliknya bila koefisien trend negatip berarti kesejahteraan buruh

menurun. Semakin besar nilai koefisien trend semakin tinggi/cepat peningkatan kesejahteraan buruh dibanding yang nilai koefisien trendnya kecil. Peningkatan kesejahteraan buruh masing-masing sektor ditunjukkan pada table 4.

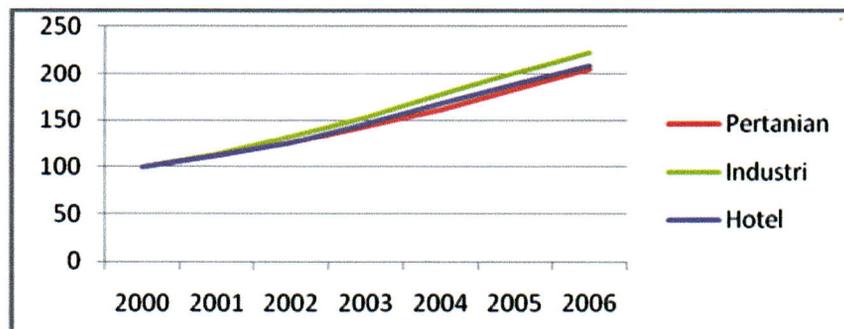
Tabel 4
Hasil Analisis Trend

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	94,692	3,125		30,306	,000
Pertanian	17,489	,867	,994	20,182	,000
Industri	20,828	,710	,997	29,351	,000
Hotel	18,675	,809	,995	23,085	,000

Hasil analisis trend menunjukkan bahwa pertumbuhan kesejahteraan buruh yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan paling tinggi dibanding sektor lain. Kesejahteraan buruh sektor industri tiap tahun rata-rata meningkat sebesar 20,828% pertahun, lebih tinggi dibanding dengan

peningkatan kesejahteraan buruh perhotelan dan pertanian yang masing-masing hanya naik sebesar 18,675% dan 17,489% pertahun. Trend kesejahteraan buruh dilihat sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2
Tend Kesejahteraan Buruh
Tahun 200 s/d 2006



PEMBAHASAN

Tinggi rendahnya upah buruh sangat menentukan kesejahteraan buruh, semakin tinggi upah yang diterima semakin tinggi tingkat kesejahteraan buruh. Upah buruh yang rendah justru cenderung menunjukkan bahwa tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Upah yang tinggi membuat daya beli masyarakat meningkat yang dapat mendorong tumbuhnya sektor industri. Di dalam konteks upaya terus menekan upah buruh, juga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ongkos sosial yang tinggi dan juga akan menyebabkan makin lemahnya konsumsi sektor privat. Oleh sebab itu kunci dari meningkatkan daya saing di Indonesia adalah pemilah-milahan industri yang jelas mempunyai keunggulan kompetitif dan meningkatkan produktivitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan buruh dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh dua indikator yaitu:

a. Nilai rata-rata kenaikan upah buruh tiap tahun lebih besar dibanding dengan nilai inflasi
Kesejahteraan masyarakat menjadi lebih rendah akibat terjadinya inflasi semakin tinggi inflasi semakin besar penurunan kesejahteraan masyarakat, karena daya beli masyarakat berkurang sebesar nilai inflasi. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selain meningkatkan gaji pegawai juga menekan laju inflasi. Pengaruh inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dieleminir apabila kenaikan gaji pegawai lebih besar dari inflasi. Dengan nilai rata-

rata kenaikan upah buruh yang lebih besar dari inflasi yang terjadi pada tahun yang sama menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh meningkat walau peningkatannya tidak sebesar kenaikan upah yang diterima karena harus dikurangi dengan besarnya inflasi.

b. Nilai rata-rata indeks upah buruh lebih besar dibanding indeks harga konsumen.

Indeks harga konsumen menggambarkan tingkat kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan barang-barang kebutuhan pokok. Naiknya harga barang yang dibutuhkan masyarakat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun, semakin tinggi indeks harga konsumen berarti harga barang yang dibutuhkan masyarakat semakin mahal sehingga masyarakat tidak mampu menjangkau. Semakin rendahnya daya beli masyarakat atau semakin tidak mampunya masyarakat untuk mengkonsumsi barang menunjukkan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang tersebut tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat apabila pendapatan masyarakat naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks upah buruh selalu lebih tinggi dibanding dengan indeks harga konsumen, sehingga buruh masih mampu membeli barang kebutuhan hidupnya karena upahnya naik lebih tinggi dibanding dengan kenaikan harga barang, bahkan daya belinya meningkat oleh karenanya kesejahteraan buruh lebih baik.

Meningkatnya kesejahteraan buruh bukan berarti jumlah masyarakat miskin berkurang, walau

upah buruh merupakan indikator kemiskinan tetapi masih banyak indikator lain yang menjadi ukuran untuk mengukur kemiskinan masyarakat. Analisis di atas terbatas pada menjelaskan bahwa kesejahteraan buruh terus bertambah apabila dibandingkan kesejahteraan tahun-tahun sebelumnya. Indikator lain untuk mengetahui apakah jumlah masyarakat miskin berkurang atau sebaliknya adalah angka pengangguran, walau kesejahteraan buruh naik seiring dengan naiknya upah buruh apabila pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan naiknya masyarakat pencari kerja maka jumlah masyarakat miskin akan meningkat karena pekerja harus menanggung beban masyarakat yang belum bekerja sehingga membuat masyarakat tidak miskin

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan :

1. Kenaikkan upah buruh dari tahun ke tahun telah mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, yang ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata upah buruh yang lebih tinggi dibanding inflasi. Upah buruh selama periode tahun 2000 sampai 2006 rata-rata naik sebesar 13,38% pertahun sementara dalam periode yang sama rata-rata inflasi hanya sebesar 7,82%.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2002, "Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur", Buku 1 Analisis dan Pembahasan Pemerintah Jawa Timur.
- , 2008. "Upah Buruh Indikator Tingkepartemen Penat Kemiskinan di Indonesia"
<http://www.berr.gov.uk/employment/pay/national-minimum-wage/index.html>
<http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+html>
<http://www.bps.go.id/sector/wages/table3.shtml>
<http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,6,nake>

menjadi miskin karena meningkatnya beban (biaya) hidup yang harus ditanggung

Selain kurang tersediannya kesempatan kerja bagi pencari kerja, meningkatnya jumlah masyarakat miskin juga didorong oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Penerunan aktivitas produksi sektor usaha yang menyebabkan di"rumah"kannya atau diputusnya hubungan kerja sejumlah buruh merupakan stimulis yang semakin mempercepat jumlah masyarakat miskin. Oleh karena itu permasalahan utama sebenarnya bukan pada keniknan upah buruh tetapi yang lebih penting adalah kelangsungan pekerjaan bagi masyarakat yang sudah bekerja serta terciptanya lapangan kerja baru untuk menampung masyarakat pencari kerja.

2. Peningkatan kesejahteraan buruh juga ditunjukkan oleh laju indeks upah buruh yang lebih besar dibanding indeks harga konsumsi. Selama periode tahun 2000 sampai dengan 2006 indeks upah buruh tumbuh sebesar 111,90% sementara indeks harga konsumen hanya tumbuh sebesar 66,86%.
3. Berdasarkan analisis trend, kesejahteraan buruh sektor industr tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan kesejahteraan buruh pertanian dan perhotelan.

- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, edisi 2, Penerbit ANDI Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro: 2002 Analisis Spasial dan Regional, AMPYKPN, Yogyakarta
- Sadono Sukirno: 1995, Pengantar Teori Makro Ekonomi, edisi 1, cetakan 2. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sasmito Wibowo, 2007 - "Peningkatan upah buruh tani maupun industri menurunkan tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta. Kapanlagi.com
- Wihana Kirana: 1993, Pengantar Ekonomi Industri, edisi pertama, BPFE – Yogyakarta